

**PENGARUH ASET PAJAK TANGGUHAN, BEBAN PAJAK TANGGUHAN,
DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA
(Studi Empiris Pada Perusahaan *Food & Beverage* Yang Terdaftar di BEI Tahun
2015-2017)**

Yogi Maulana Putra
yogiputra1387@gmail.com
Kurnia

Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of deferred tax asset, tax expense, and tax planning on the earnings management. While, the population was food and beverage companies which were listed on Indonesia Stock Exchange 2015-2015. The research was descriptive-quantitative. Moreover, the data collection technique used purposive sampling, in which the collection was based criteria given. In line with, there were 14 food and beverage company which were listed on indonesia stock exchange 2015-2017. In addition, the data analysis technique used descriptive analysis, multiple linier regression analysis, classical assumption test, multiple determinant coefficient test and hypothesis test. The research result concluded deffered tax asset has positive effect on the earnings management. On the other hand, the deffered tax burden had negative effect on the earning management. Moreover, tax planning with not affect the earning management.

Keyword: deffered tax asset, deffered tax burden, tax planning, earning management.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Objek penelitian ini yaitu perusahaan *food & beverage* yang terdaftar di bursa efek indonesia pada periode tahun 2015-2017. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan diperoleh sebanyak 14 perusahaan *food & beverage* yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2015-2017. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji koefisien determinan berganda, serta uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Kemudian beban pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba

Kata kunci : Aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, perencanaan pajak, dan manajemen laba.

PENDAHULUAN

Manajemen sebagai pihak internal perusahaan selalu berupaya dengan meningkatkan laba perusahaan. Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba (*sustainable earnings*) di masa depan, yang ditentukan oleh komponen akrual dan kas sehingga dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Tujuan utama yang ingin dicapai manajemen yakni memperoleh laba setinggi mungkin. Hal ini sangat berkaitan dengan bonus yang diperoleh pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan secara langsung, yakni semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka kemungkinan manajemen mendapatkan bonus dari perusahaan akan semakin tinggi.

Selain itu, informasi laba dalam laporan keuangan perusahaan cukup penting khususnya bagi mereka yang menggunakan laporan keuangan untuk mengestimasi *earning power* (kekuatan laba) untuk menaksir resiko dalam berinvestasi dan kredit. Tetapi, konflik kepentingan terjadi diantara pemilik (investor) dengan agen (manajemen) untuk memaksimalkan utilitas masing-masing. Sehingga akan memunculkan tanda tanya mengenai

laba yang dilaporkan. Pentingnya informasi laba yang tercantum pada laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen karena laba tersebut digunakan untuk mengukur kinerja manajemen. Sehingga memungkinkan manajemen bertindak sesuai dengan kepentingannya atau dikenal dengan istilah manajemen laba.

Manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk melakukan intervensi dalam penyusunan laporan keuangan untuk meningkatkan atau menurunkan laba dengan memanipulasi angka - angka dalam laporan keuangan dan mempermainkan metode atau prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan yang tidak lagi mencerminkan kinerja manajemen sesungguhnya, namun telah direayasa sedemikian rupa sehingga menjadi lebih baik sesuai dengan keinginan manajemen. Inilah yang disebut *agency problem* (Sulistyanto, 2008:132).

Pihak eksternal dan internal sebagai pengguna laporan keuangan di dalam suatu perusahaan terkadang terdapat berbagai kepentingan sehingga dapat menimbulkan pertentangan yang dapat merugikan pihak-pihak tersebut. Dalam artian di satu sisi manajemen perusahaan ingin menampilkan kinerja keuangan yang baik dengan memaksimalkan laba yang dilaporkan kepada pemegang saham dan pengguna eksternal lainnya. Namun, disisi yang lain perusahaan ingin menampilkan laba kena pajak yang minimum agar terhindar dari pengenaan pajak yang besar.

Pajak yang ditanggung oleh perusahaan merupakan elemen biaya yang dapat mengurangi laba, karena semakin tinggi pajak tertanggung maka semakin kecil pula laba yang diperoleh perusahaan. Sehingga timbul kecenderungan pihak manajemen untuk meminimalisir pembayaran pajaknya, upaya untuk meminimalkan pajak sering disebut perencanaan pajak (Suandy, 2011). Perencanaan pajak (*tax planning*) juga dapat diartikan usaha wajib pajak untuk mengatur pajaknya dengan tujuan akhir perencanaan ini menyebabkan utang pajak yang minim, baik PPh maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin, selama hal ini tidak melanggar dan masih di dalam koridor peraturan perpajakan yang berlaku. Sebab itu, perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tindakan yang legal karena pada dasarnya perpajakan di Indonesia menggunakan sistem *self assessment*. Dengan kata lain pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dan memperbolehkan wajib pajak mengatur pajaknya selama tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perencanaan pajak berkaitan dengan pelaporan laba perusahaan dikarenakan laba yang besar akan menimbulkan beban pajak perusahaan yang juga besar. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dapat menggunakan teknik manajemen laba agar mencapai target laba. Berbagai tindakan dilakukan oleh perusahaan untuk merencanakan pajaknya dengan memanipulasi aktivitas operasi perusahaan (*real earning management*).

Berkaitan dengan manajemen laba, adanya perbedaan metode dalam peraturan pajak dengan akuntansi komersial yang mengakibatkan koreksi fiskal berupa koreksi negatif dan koreksi positif. Koreksi negatif akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan sedangkan koreksi positif akan menghasilkan aset pajak tangguhan (Djamaluddin, 2008:58). Aset pajak tangguhan adalah aset yang terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut undang - undang pajak (Waluyo, 2008:217). Aset pajak tangguhan yang jumlahnya diperbesar oleh manajemen dimotivasi adanya pemberian bonus dan beban politis atas besarnya perusahaan sehingga manajemen termotivasi untuk melakukan manajemen laba, jika jumlah aset pajak tangguhan semakin besar maka semakin tinggi indikasi manajemen melakukan manajemen laba (*earning management*).

Perusahaan di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan juga peraturan perpajakan yang

berlaku. Namun, untuk menjalankan fungsi *budgeter* dan regulasi perpajakan, pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak) menetapkan beberapa perlakuan khusus yang berbeda dengan aturan akuntansi dalam PSAK. Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan perpajakan disebabkan tujuan antara pemerintah dan perusahaan bertentangan. Laporan akuntansi pada perusahaan lebih memberikan keleluasaan manajemen dalam menentukan prinsip dan estimasi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan menurut peraturan perpajakan. Semakin besar motivasi pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba maka akan menyebabkan semakin besar perbedaan antara laba akuntansi dengan laba perpajakan.

Beban pajak tangguhan merupakan beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Sedangkan maksud dari perbedaan temporer adalah perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu berdasarkan standar akuntansi dengan peraturan perpajakan (Suandy, 2011). Beban pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam memanipulasi laporan keuangannya. Sedangkan dalam beban pajak tangguhan menjelaskan bahwa suatu beban pajak tangguhan dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan manajemen laba karena beban pajak tangguhan dapat menurunkan tingkat laba dalam perusahaan.

Berbagai penelitian mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba sudah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu sebagaimana penelitian yang dilakukan Fitriany (2016) yang hasil penelitiannya perencanaan pajak dan aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Selain itu Fitriany (2016) menyatakan bahwa semakin bagus perencanaan pajaknya maka semakin besar perusahaan melakukan manajemen laba. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2017) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan menurut Aditama (2014) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas terdapat perbedaan pendapat antara peneliti satu dengan lainnya akan aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan

Menurut Hakim (2015) teori agensi merupakan model yang digunakan untuk memformulasikan antara manajemen dengan pemilik. Kinerja perusahaan telah dicapai oleh pihak manajemen diinformasikan kepada pihak pemilik (*principal*) dalam bentuk laporan keuangan. Sistem desentralisasi, manajemen mempunyai informasi yang superior dibandingkan dengan pemilik, karena manajemen telah menerima pendelegasian untuk pengambilan keputusan/kebijakan perusahaan. Manajemen dapat menentukan kebijakan yang mengarah pada peningkatan level kompensasinya secara potensial ketika pemilik tidak dapat memonitoring secara sempurna aktivitas manajemen. Seluruh tindakan telah didelegasikan oleh pemilik (*principal*) kepada manajer (*agent*) pada model hubungan principal-agent.

Teori keagenan menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi adanya konflik kepentingan antara agen dengan prinsipal yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai atau untuk mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaknya (Djamaludin, 2008:56). Prinsipal tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja

agen, maka prinsipal tidak pernah merasa pasti bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan. Dengan demikian, prinsipal berada sebagai asimetri informasi karena agen lebih mengetahui kinerja dan aktivitas perusahaan dibandingkan prinsipal.

Pada dasarnya *agency theory* digunakan untuk mendeskripsikan relasi antara *principal* (pemilik) dan *agent* (manajemen). Pemilik atau pemegang saham melimpahkan kewenangannya kepada manajemen untuk mengelola perusahaan. Kinerja perusahaan yang dicapai oleh pihak manajemen diinformasikan kepada pihak pemilik (*principal*) dalam bentuk laporan keuangan. Dengan sistem desentralisasi seperti ini maka dapat diketahui bahwa manajemen memiliki ke superiorannya akan informasi dibandingkan dengan pemilik perusahaan, dikarenakan manajemen telah menerima pelimpahan dari pemilik perusahaan atas pengambilan keputusan/kebijakan perusahaan yang telah diberikan oleh pemilik. Maka, manajemen dapat menentukan kebijakan yang menguntungkan dirinya sebelum memberikan manfaat kepada pemilik atau pemegang saham (Fahmi, 2014).

Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses, yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu dimasa mendatang. Menurut Watt & Zimmerman (1986) Perkembangan teori akuntansi positif tidak dapat dilepaskan dari ketidakpuasan terhadap teori normatif.

Terdapat tiga alasan mendasar terjadinya pergeseran pendekatan normatif ke positif, yaitu: 1) Ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris, karena didasarkan pada premis atau asumsi yang salah sehingga tidak dapat diuji keabsahannya secara empiris; 2) Pendekatan normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas; 3) Pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Hal ini mengingat bahwa dalam system perekonomian yang didasarkan pada mekanisme pasar, informasi akuntansi dapat menjadi alat pengendali bagi masyarakat dalam mengalokasi sumber daya ekonomi secara efisien.

Untuk mengurangi kesenjangan dalam pendekatan normatif, Watt & Zimmerman (1986) mengembangkan pendekatan positif dengan 3 hipotesis utama, yakni : 1) Hipotesis rencana bonus (*the bonus plan hypothesis*) → Pada perusahaan tertentu yang memiliki rencana pemberian bonus kepada karyawannya, maka manajer akan cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan; 2) Hipotesis kontrak hutang (*the debt to equity hypothesis*) → Dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini; 3) Hipotesis biaya politik (*the political cost hypothesis*) → Dalam hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan perekayasaan penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung.

Manajemen Laba

Manajemen laba adalah usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk merekayasa angka-angka kepada pihak eksternal dengan tujuan untuk keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara mengubah atau mengabaikan standar akuntansi yang telah ditetapkan, sehingga menyajikan informasi yang tidak sebenarnya yang dapat menyesatkan pihak-pihak eksternal

yang menggunakan laporan keuangan tersebut dalam pertimbangan pengambilan keputusan.

Tentunya segala tindakan ada sebab ataupun motivasi atas dilakukannya suatu tindakan tersebut. Tidak terlepas dengan manajemen laba, menurut Sulistyanto (2008:63) ada beberapa motivasi yang melatar belakangi tindakan pengaturan laba yakni : 1) Rencana Bonus; 2) Kontrak Utang Jangka Panjang; 3) Motivasi Politis; 4) Motivasi Perpajakan; 5) Pergantian Direksi; 6) Penawaran Perdana

Dengan adanya beberapa motivasi yang membuat perusahaan melakukan manajemen laba, tentunya ada tindakan yang dilakukan untuk memajemen laba perusahaan. Menurut Zulhamri (2016) tindakan manajemen laba dapat digolongkan dalam beberapa bentuk manajemen laba, yakni : 1) *Taking a bath* → Teknik ini bisa dipakai apabila terjadi tekanan saat reorganisasi, misalnya pergantian direksi. Apabila teknik ini dilakukan maka seluruh biaya yang ada pada periode mendatang diakui pada periode berjalan. Yang tentunya berakibat pada laba periode mendatang akan menjadi tinggi, meskipun kondisi kurang menguntungkan dikarenakan seluruh biayanya ditanggung pada periode berjalan yang pastinya ini membebani pada saat periode berjalan; 2) *Income minimization* → Merupakan teknik yang digunakan untuk meminimalkan laba, alasannya dikarenakan faktor politik atau motif untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Teknik ini digunakan pada saat perusahaan mengalami profitabilitas yang cukup tinggi. Kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan yang menggunakan teknik ini yakni bisa dilakukan dengan cara penghapusan atas barang modal dan aktiva tak berwujud, riset, dan pembebanan pengeluaran iklan; 3) *Income maximization* → Kebalikan dari *income minimization*, teknik ini digunakan untuk memaksimalkan laba. Teknik ini biasanya digunakan dengan tujuan untuk memperoleh bonus yang lebih tinggi. Atau juga bisa dilakukan untuk menghindari pelanggaran dari kontrak hutang jangka panjang perusahaan; 4) *Income smoothing* → Teknik ini dilakukan dengan cara melaporkan pertumbuhan yang cenderung stabil untuk stake holder atau pihak eksternal yang membutuhkan, ketimbang melaporkan perubahan laba yang meningkat ataupun sebaliknya penurunan yang drastis. Teknik ini sangat disukai oleh investor dikarenakan kebanyakan investor sangat menyukai laba yang relatif stabil; 5) *Timing revenue and expenses recognition* → Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan timing suatu transaksi, misalnya pengakuan premature atas pendapatan.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan adalah aktiva yang terjadi apabila terjadi perbedaan waktu yang menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak di undang-undang pajak (Waluyo, 2008:217). Trisnawati (2013: 244) menyatakan bahwa aset pajak tangguhan (*deffered tax asset*) timbul apabila terjadi perbedaan waktu yang menyebabkan terjadinya koreksi positif sehingga beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dari pada beban pajak menurut peraturan perpajakan.

Pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi komersial dengan peraturan perpajakan dan saldo kerugian yang dapat dikompensasi pada periode mendatang menurut PSAK No. 46 (IAI, 2009: 8). Menurut Timuriana (2015) kewajiban pajak tangguhan maupun aset pajak tangguhan dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut : 1) Apabila penghasilan sebelum pajak (*pretax accounting income*) lebih banyak dari penghasilan kena pajak (*taxible income*), maka beban pajak (*tax expense*) akan lebih banyak dari pajak terutang (*tax payable*), sehingga akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan (*deferred taxes liability*). kewajiban

pajak tangguhan dapat dihitung dengan mengalikan perbedaan temporer dengan tarif pajak yang berlaku; 2) Sebaliknya jika penghasilan sebelum pajak lebih sedikit dari penghasilan kena pajak, maka beban pajak juga lebih sedikit dari pajak terutang, sehingga akan menghasilkan aset pajak tangguhan. aktiva pajak tangguhan sama dengan perbedaan sementara dengan tarif pajak pada saat perbedaan tersebut terpulihkan.

Dengan diberlakukannya PSAK No.46 yang mensyaratkan para manajer untuk mengakui dan menilai kembali aset pajak tangguhan yang dapat disebut pencadangan nilai aset pajak tangguhan. Peraturan ini dapat memberikan kebebasan manajemen untuk menentukan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian aset pajak tangguhan pada laporan keuangannya, sehingga dapat digunakan untuk mengindikasikan ada tidaknya rekayasa laba atau manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan keuangan yang dilaporkan dalam rangka menghindari penurunan atau kerugian laba.

Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan diartikan sebagai beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Sedangkan maksud dari perbedaan temporer adalah perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu berdasarkan standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2011). Harnanto (2011:115) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan merupakan beban yang timbul akibat perbedaan sementara antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak).

Terdapat perbedaan antara beban pajak penghasilan dengan PPh terutang yang dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu : 1) Perbedaan permanen atau tetap → Perbedaan permanen muncul dari adanya penghasilan yang bukan termasuk objek pajak atau penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final (PPh final), dan adanya *non-deductible expenses*, contohnya penghasilan bunga deposito; 2) Perbedaan temporer atau waktu → Perbedaan temporer adalah perbedaan karena adanya pengakuan pembebanan dalam periode yang berbeda, namun perbedaan tersebut tetap diakui baik dalam laporan keuangan komersial maupun dalam laporan keuangan fiskal tetapi dalam periode yang berbeda. Perbedaan temporer merupakan perbedaan dasar pengenaan pajak (DPP) dari suatu aktiva atau kewajiban, yang menyebabkan laba fiskal bertambah atau berkurang pada periode yang akan datang. Perbedaan temporer disebabkan oleh perbedaan persyaratan waktu item pendapatan dan biaya.

Laporan keuangan komersial memasukkan penghasilan lain-lain, sedangkan laporan keuangan fiskal tidak memasukkan dalam perhitungan laba fiskal karena telah dikenakan PPh final. Selain itu terdapat beberapa jenis beban yang tidak boleh menjadi pengurang oleh undang-undang perpajakan. Sebagai contoh, biaya sumbangan.

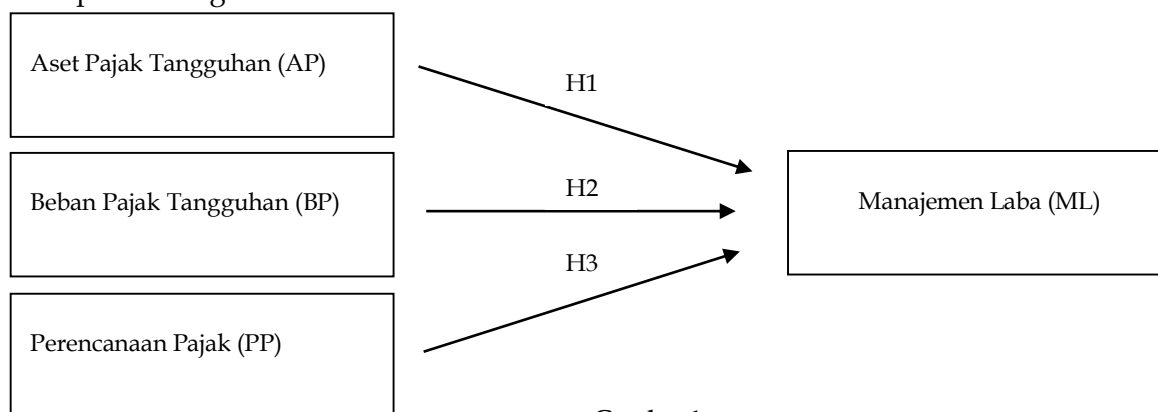
Perencanaan Pajak

Suandy (2011) mendefinisikan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. Perencanaan pajak merupakan upaya yang dapat dimanfaatkan wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usahanya atau penghasilannya. Dalam hal ini perencanaan pajak yang dimaksud tidak melanggar ketentuan undang – undang perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak dapat dilakukan karna wajib pajak memiliki kapasitas dalam membuat aktivitas keuangan agar mendapatkan pengeluaran beban pajak yang seminimal mungkin.

Menurut Suandy (2011:12) Ada beberapa perilaku yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisir beban pajaknya, yakni : 1) Pergeseran pajak (*tax shifting*) adalah memindahkan beban pajaknya kepada subjek pajak ke pihak lainnya. Secara otomatis orang atau badan yang seharusnya dikenakan atas beban pajaknya menjadi tidak menanggung beban pajaknya sama sekali; 2) *Tax saving* adalah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah; 3) Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan, Sering kali Wajib Pajak kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan; 3) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah sejumlah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisir beban pajaknya dengan cara merekayasa dan dapat diterima dikarenakan masih dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku.

Rerangka Konseptual

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan telaah pustaka, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu rerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Aset pajak tangguhan merupakan aset yang terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut undang undang pajak (Waluyo, 2008:217). Menurut Trisnawati (2013, 244) aset pajak tangguhan (deffered tax asset) muncul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi positif sehingga beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dari pada beban pajak menurut peraturan perpajakan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46 revisi 2012 menyatakan aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Peraturan ini dapat memberikan kebebasan manajemen untuk menentukan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian aset pajak tangguhan pada laporan keuangannya, sehingga dapat digunakan untuk mengindikasikan ada tidaknya rekayasa laba atau manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan keuangan yang dilaporkan dalam rangka menghindari penurunan atau kerugian laba.

Berdasarkan pernyataan diatas mengemukakan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba karena aset pajak tangguhan yang jumlahnya diperbesar oleh manajemen dengan dorongan adanya pemberian bonus yang akan diterima,

beban politis atas besarnya perusahaan dan meminimalisasi pembayaran pajak agar tidak merugikan perusahaan. Maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₁ : Aset Pajak Tanggungan berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba

Pengaruh Beban Pajak Tanggungan terhadap Manajemen Laba

Beban pajak tanggungan adalah beban yang timbul akibat perbedaan sementara antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak) (Harnanto, 2011:115). Menurut Zain (2008:187) pajak tanggungan terjadi akibat perbedaan antara PPh terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan (pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer.

Penelitian mengenai beban pajak tanggungan di Indonesia dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan Subagyo, Oktavia, Mariana (2011) menunjukkan bahwa beban pajak tanggungan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, *discretionary accrual* berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba, beban pajak tanggungan dan *discretionary accrual* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Ulfah (2013) beban pajak tanggungan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Dari beberapa pengertian dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat disimpulkan bahwa beban pajak tanggungan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan manajemen laba karena beban pajak tanggungan dapat menurunkan tingkat laba dalam perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Beban Pajak Tanggungan berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba

Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Sulistyanto (2008:96) menyatakan bahwa semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar pula pajak yang ditanggung. Sebaliknya semakin kecil laba yang diperoleh perusahaan, semakin kecil pula kewajiban perpajakan yang ditanggung. Manajer cenderung selalu berusaha untuk meminimalisir kewajibannya, termasuk kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, manajer akan berusaha agar laba perusahaan selalu kelihatan lebih rendah dari pada laba yang sesungguhnya. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir pajak yang harus dibayar perusahaan.

Untuk menghindari beban pajak yang terlalu besar, maka perusahaan akan melakukan manajemen laba agar laba yang dilaporkan lebih rendah sehingga dapat mengurangi beban pajak tanggungan yang ditanggung perusahaan. Berdasarkan keterangan diatas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah bersifat kuantitatif. (Sugiyono, 2014: 13) mendefinisikan metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data dengan menggunakan instrumen penelitian dan analisis data yang bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi yang diamati dalam penelitian ini adalah perusahaan *consumer goods industry* sektor *food & beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2017 dengan 3 tahun pengamatan.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan *food & beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 - 2017. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yakni memiliki kriteria atau tujuan tertentu terhadap sampel yang diteliti. Adapun kriteria - kriteria yang dipilih adalah sebagai berikut: 1) Perusahaan *food & beverage* yang terdaftar di BEI selama periode 2015 - 2017; 2) Perusahaan *food & beverage* yang tidak di-delisting selama periode 2015 -2017; 3) Perusahaan *food & beverage* yang mempublikasikan laporan keuangan secara konsisten selama periode 2015 - 2017; 4) Perusahaan *food & beverage* dengan laporan keuangan yang memuat informasi lengkap terkait variabel yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter yaitu data yang diperoleh melalui media perantara berupa bukti catatan atau laporan historis. Berdasarkan sumbernya, data ini menggunakan data sekunder. Pencarian terhadap sumber-sumber tersebut tentunya didasarkan pada permasalahan penelitian. Data sekunder ini diperoleh dari laporan keuangan di Galeri Bursa Efek Indonesia di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya dan di website IDX (www.idx.co.id). Metode pengumpulan data ini menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang diperlukan. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan studi kepustakaan, yaitu suatu cara memperoleh data dengan cara mempelajari buku-buku dan artikel penelitian terdahulu untuk literature. Sumber data diperoleh dari situs resmi di Galeri Bursa Efek Indonesia di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya dan di website IDX (www.idx.co.id).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel dibedakan menjadi dua yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel Independen pada penelitian ini aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, dan perencanaan pajak, sedangkan variabel dependen pada penelitian ini manajemen laba.

Manajemen Laba

Variabel manajemen laba merupakan variable *dummy*, yakni variabel yang bersifat kategorikal, manajemen laba dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy* dan dibagi ke dalam dua kategori yakni *range small profit* dan *small loss firms*. Untuk menentukan perusahaan berada dalam *range small profit* atau *small loss firms* dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ML\ it = \frac{\{ Net\ Income\ it - Net\ Income\ i\ (t-1) \}}{Market\ Value\ Equity\ i\ (t-1)}$$

Market Value Equity diukur dengan formula, yaitu :

$$MVE\ i\ (t-1) = Saham\ yang\ beredar \times harga\ saham$$

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan adalah asset yang terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut undang-undang pajak (Waluyo, 2008:217).

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah aset pajak tangguhan yang diukur dengan perubahan nilai aset pajak tangguhan pada akhir periode t dengan t-1 dibagi dengan nilai aset pajak tangguhan pada akhir periode t.

$$AP\ it = \frac{\Delta\ Aset\ pajak\ tangguhan\ it}{Aset\ pajak\ tangguhan\ t-1}$$

Beban Pajak Tangguhan

Menurut Harnanto (2011:115) Perbedaan antara laporan keuangan, standar akuntansi dan fiskal disebabkan dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan asumsi dibandingkan yang diperolahkan menurut pajak.

Penghitungan tentang beban pajak tanggungan dihitung dengan menggunakan indikator membobot beban pajak tanggungan dengan total aktiva atau total aset. Hal itu dilakukan untuk pembobotan beban pajak tanggungan dengan total aset pada periode t-1 untuk memperoleh nilai yang terhitung dengan proporsional.

$$BP_{it} = \frac{\text{Beban pajak tanggungan } t}{\text{Total aset } t-1}$$

Perencanaan Pajak

Perencanaan Pajak adalah dengan cara mengatur seberapa besar laba yang dilaporkan, sehingga masuk dalam indikasi adanya praktik manajemen laba. Untuk menghindari beban pajak yang terlalu besar, maka perusahaan akan melakukan manajemen laba agar laba yang dilaporkan kepada fiskal lebih rendah sehingga akan mengurangi beban pajak yang akan ditanggungnya. Maka penelitian ini variabel perencanaan pajak diukur dengan rumus:

$$PP_{it} = \frac{\text{Net Income}_{it}}{\text{Pretax Income}_{it}}$$

Keterangan :

PP_{it} = Perencanaan pajak perusahaan i pada tahun t

$Net\ Income_{it}$ = Laba bersih perusahaan i pada tahun t

$Pretax\ Income_{it}$ = Laba sebelum pajak perusahaan i tahun t

Teknik Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan memberikan gambaran atau deskriptif variabel yang diteliti yang dilihat dengan nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum dan tren. Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang mendasar untuk dapat menggambarkan secara umum dan memberikan deskriptif mengenai variabel-variabel penelitian yaitu Aset pajak tanggungan, beban pajak tanggungan, perencanaan pajak, dan manajemen laba.

Uji Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu aset pajak tanggungan, beban pajak tanggungan, dan perencanaan pajak terhadap variabel dependen yaitu manajemen laba.

$$ML = a + \beta_1 AP + \beta_2 BP + \beta_3 PP + e$$

Keterangan :

ML = Manajemen laba.

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

AP = Aset pajak tanggungan

BP = Beban pajak

PP = Perencanaan pajak

e = Standar Error

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas data ini adalah pengujian bertujuan untuk menguji variabel independen dan variabel dependen mempunyai distribusi normal atau tidak. Dengan dasar pengambilan keputusan, jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka menunjukkan distribusi normal dengan memenuhi uji asumsi normalitas. Uji normalitas dengan grafik *normal P-P plot regression standardized residual* dan juga menggunakan uji *one-sample kolmogrov-smirnov test*.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui dalam suatu model regresi linier terdapat hubungan korelasi antar residual pada periode t dengan residual periode t-1 sebelumnya. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendekteksi ada atau tidaknya masalah autokorelasi dengan menggunakan metode *Durbin-Watson (DW)* yang bernilai antara -2 hingga +2, maka disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini model regresi yang terjadi ketidaksamaan antara varian dari residual suatu pengamatan lainnya (Ghozali, 2011: 139). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga dapat diuji dengan dilihat *scatterplot* antara SREID dan ZPRED bahwa ada tidaknya masalah heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Uji multikolinearitas merupakan model penelitian yang dilakukan dengan menggunakan nilai *tolerance* dan VIF dari masing-masing variabel dependen terhadap variabel dependen. Jika nilai VIF disekitar 1 dan kurang dari 10, dari hasil pengolahan data dengan program SPSS, semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0.10 dan VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Koefisien Determinasi Berganda

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji koefisien determinasi (R^2) memiliki nilai limit $0 \leq R^2 \leq 1$. Jika nilai dari R^2 semakin besar atau mendekati nilai satu, maka variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji Hipotesis

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji ini juga dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik (Ghozali, 2011: 97). Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah variabel-variabel bebas dimasukkan dalam model yang mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Model regresi dikatakan layak apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 sedangkan apabila tingkat signifikansi lebih dari 0,05, maka dinyatakan tidak layak.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t dapat menunjukkan seberapa pengaruh antara variabel independen terhadap dependen (Ghozali, 2011: 98). Kriteria pengujian ini dengan membandingkan tingkat

signifikansi dari nilai t (0,05) dengan $< 0,05$ secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen, jika $> 0,05$ maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ini memberikan gambaran umum suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*) dan standard deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Hasil dari uji statistik deskriptif tersaji pada tabel 1.

Tabel 1
Hasil Analisis Deskriptif

	N	<i>Descriptive Statistics</i>			
		<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
AP	42	.006	11.289	1.82545	2.176951
BP	42	.003	1.151	.07733	.188144
PP	42	.118	3.623	.83467	.494928
ML	42	-.250	.392	.01426	.103751
Valid N (<i>listwise</i>)	42				

Sumber : Data sekunder diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa jumlah observasi (N) yang diteliti sebanyak 42 data pengamatan. Data tersebut diperoleh dari laporan keuangan perusahaan *food & beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017, dengan deskripsi masing-masing variabel sebagai berikut : 1) Aset Pajak Tangguhan pada penelitian ini menunjukkan nilai *minimum* sebesar 0.006 dan nilai *maximum* sebesar 11.289, sedangkan nilai rata-rata AP (Aset Pajak Tangguhan) sebesar 1.83 dan nilai Standart Deviasi sebesar 2.18; 2) Beban Pajak Tangguhan pada penelitian ini menunjukkan nilai *minimum* sebesar 0.003 dan nilai *maximum* sebesar 1.151, sedangkan nilai rata-rata BP (Beban Pajak) sebesar 0.08 dan nilai standart deviasi sebesar 0.19; 3) Perencanaan Pajak pada penelitian ini menunjukkan nilai *minimum* sebesar 0.118 dan nilai *maximum* sebesar 3.623, sedangkan nilai rata-rata PP (Perencanaan Pajak) sebesar 0.83 dan nilai standart deviasi sebesar 0.49; 4) Manajemen Laba pada penelitian ini menunjukkan nilai *minimum* sebesar -0.250 dan nilai *maximum* sebesar 0.392, sedangkan nilai rata-rata ML (Manajemen Laba) sebesar 0.01 dan nilai standart deviasi sebesar 0.1.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, dan perencanaan pajak terhadap variabel dependen yaitu manajemen laba. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh persamaan regresi linier yang tersaji pada table 2.

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	<i>Coefficients^a</i>		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error			
1					
(Constant)	.044	.038		1.181	.245
AP	.312	.108	.246	2.538	.012
BP	-.219	.087	-.134	2.216	.023
PP	.109	.033	.092	1.266	.792

a. *Dependent Variable: ML*

Sumber : Data Sekunder diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 2, Persamaan regresi yang didapat adalah $ML = 0,044 + 0,312 APit - 0,219 BPit + 0,109 PPit$

Konstanta (α) sebesar 0,044. Artinya jika variabel Aset Pajak Tangguhan (AP), Beban Pajak Tangguhan (BP), Perencanaan Pajak (PP) sama dengan 0, maka Manajemen Laba sebesar 0.044.

Koefisien Regresi Aset Pajak Tangguhan (AP) sebesar 0,312. nilai koefisien regresi ini bersifat positif Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar aset pajak tangguhan yang ada pada perusahaan maka semakin besar pula manajemen laba yang dilakukan perusahaan.

Koefisien Regresi Beban Pajak Tangguhan (BP) sebesar -0,219. nilai koefisien regresi ini bersifat negatif Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar perusahaan menanggung beban pajak tangguhannya maka semakin kecil perusahaan melakukan manajemen laba.

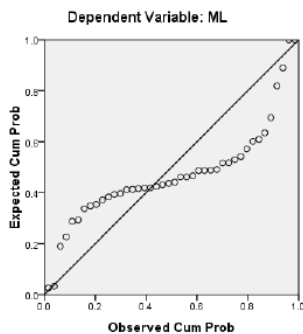
Koefisien Regresi Perencanaan Pajak (PP) sebesar 0,109. nilai koefisien regresi ini bersifat positif Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat perusahaan merencanakan pajaknya maka semakin tinggi pula perusahaan melakukan manajemen laba.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas data ini adalah pengujian bertujuan untuk menguji variabel independen dan variabel dependen mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini mengetahui normal tidaknya dengan menggunakan pendekatan grafik dan uji *one-sample kolmogrov-smirnov test* berdasarkan taraf signifikan pada hasil hitungan. Hasil dari uji normalitas dengan menggunakan pendekatan grafik, nampak pada Gambar 2.

Gambar 2
Hasil Uji Normalitas
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data Sekunder diolah, 2019.

Gambar grafik normal plot menunjukkan bahwa pola data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel dalam penelitian ini memenuhi uji normalitas. Oleh sebab itu dianjurkan di samping menggunakan uji grafik dilengkapi juga dengan uji statistik, salah satunya dengan menggunakan uji statistik non-parametik *Kolmogorov-Smirnov*. Jika hasilnya mempunyai nilai P-value $\geq 0,05$ maka dikatakan data normal. Hasil dari pengujian *Kolmogorov-Smirnov* yang nampak pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		<i>Unstandardized Residual</i>
	N	42
<i>Normal Parameters^a</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	.10065461
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.244
	<i>Positive</i>	.244
	<i>Negative</i>	-.188
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		1.580
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.104

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019.

Berdasarkan hasil pengujian normatif pada Tabel 3, dapat diketahui bahwa pengujian memberi nilai Z hitung sebesar 1,580 dengan taraf signifikansi sebesar 0,104. Nilai taraf signifikansi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Signifikansi diatas 0,05 yang menunjukkan bahwa nilai residual tidak mempunyai perbedaan dengan nilai standar baku. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa data terdistribusi secara normal atau asumsi normalitas sudah terpenuhi.

Uji Autokorelasi

Untuk mendekteksi ada atau tidaknya masalah autokorelasi dengan menggunakan metode *Durbin-Watson* (DW) yang bernilai antara -2 hingga +2, maka disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Hasil dari uji autokorelasi tersaji di tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

<i>Model Summary^b</i>					
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	.379 ^a	.143	.116	.104552	1.898

a. Predictors: (Constant), PP, BP, AP
b. Dependent Variable: ML

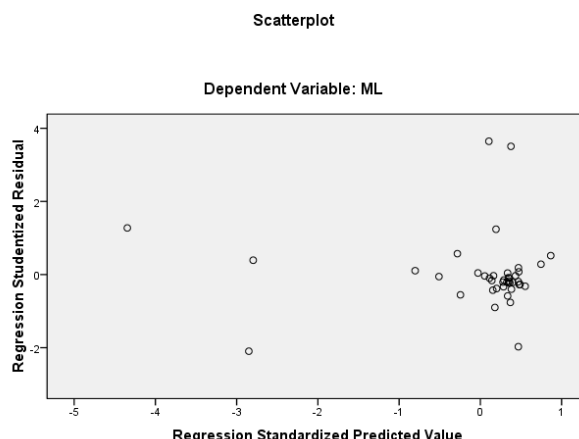
Sumber: Data Sekunder diolah, 2019.

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi pada Tabel 4, menunjukkan nilai *Durbin Watson* sebesar 1,898. Nilai tersebut berada diantara -2 sampai 2 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi atau bebas dari autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini model regresi yang terjadi ketidaksamaan antara varian dari residual suatu pengamatan lainnya (Ghozali, 2011: 139). Hasil uji heteroskedastisitas dengan metode grafik *scatterplot* untuk model regresi dapat disajikan pada gambar 3.

Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Sekunder diolah, 2019.

Berdasarkan gambar 3 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar dengan baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan pada model regresi layak dipakai, karena tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Hasil uji asumsi multikolinieritas dengan menggunakan nilai VIF untuk model regresi dapat disajikan di tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	AP	.971	1.030
	BP	.992	1.008
	PP	.978	1.023

a. Dependent Variable: ML

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa besarnya nilai pada model regresi tidak terdapat masalah dan tidak adanya korelasi antar variabel independen dalam uji multikolinieritas, karena dalam hasil uji diatas adalah lebih kecil dari 10 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Uji Koefisien Determinasi Berganda

Nilai R² ini memberikan informasi yang telah dibutuhkan untuk memprediksi variabel independen (Ghozali, 2011: 97). Hasil koefisien determinasi variabel untuk model regresi 1 dapat disajikan pada tabel 6.

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi Berganda (R²)

<i>Model Summary^b</i>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.379 ^a	.143	.116	.104552

a. Predictors: (Constant), PP, BP, AP

b. Dependent Variable: ML

Sumber: Data sekunder diolah, 2019.

Berdasarkan hasil uji pada tabel 6 menunjukkan bahwa nilai Koefisien Determinan berganda (R²) sebesar 0.143 atau 14.3% yang menunjukkan kontribusi dari variabel aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian sebesar 85.7%.

Uji Hipotesis

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji ini juga dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik (Ghozali, 2011: 97). Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah variabel-variabel bebas dimasukkan dalam model yang mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Model regresi dikatakan layak apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 Hasil kelayakan model regresi ini dapat disajikan dalam tabel 7.

Tabel 7
Hasil Uji Kelayakan Model

Model	<i>ANOVA^b</i>				
	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1 <i>Regression</i>	.186	3	.062	2.138	.006 ^a
<i>Residual</i>	1.091	38	.029		
<i>Total</i>	.441	41			

a. Predictors: (Constant), PP, BP, AP

b. Dependent Variable: ML

Sumber : Data Sekunder diolah, 2019.

Berdasarkan hasil tabel 7 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 2.318 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang diestimasi layak digunakan dalam penelitian ini karena $< 0,05$.

Uji Parsial (Uji t)

Kriteria pengujian ini dengan membandingkan tingkat signifikansi dari nilai t (0,05) dengan $< 0,05$ secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian dari hipotesis terhadap nilai signifikan dapat disajikan pada tabel 8.

Tabel 8
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	.044	.038		1.181	.245
AP	.312	.108	.246	2.538	.012
BP	-.219	.087	-.134	2.216	.023
PP	.109	.033	.092	1.266	.792

a. Dependent Variable: ML

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 8 diperoleh hasil perhitungan nilai t beserta tingkat signifikan dengan penjelasan sebagai manajemen laba berikut : 1) Variabel AP (Aset Pajak Tangguhan) berpengaruh terhadap dengan tingkat signifikan sebesar 0.012 atau nilai signifikan < 0.05. Maka diputuskan untuk hipotesis diterima yang berarti aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba; 2) Variabel BP (Beban Pajak Tangguhan) berpengaruh terhadap manajemen laba dengan tingkat signifikan sebesar 0.023 atau nilai signifikan < 0.05. maka diputuskan untuk hipotesis diterima yang berarti beban pajak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba; 3) Variabel PP (Perencanaan Pajak) berpengaruh terhadap manajemen laba dengan tingkat signifikan sebesar 0.792 atau nilai signifikan > 0.05. maka diputuskan untuk hipotesis ditolak yang berarti perencanaan pajak tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Pembahasan

Pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Aset pajak tangguhan adalah aset yang terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut Undang-Undang pajak. Definisi Aktiva Pajak Tangguhan merupakan aktiva yang terjadi apabila ada perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut undang-undang pajak (Waluyo, 2008:217). Aset pajak tangguhan disebabkan jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Besarnya aset pajak tangguhan dicatat apabila dimungkinkan adanya realisasi manfaat pajak di masa yang akan datang. Oleh karena itu dibutuhkan *judgment* untuk menaksir seberapa mungkin aset pajak tangguhan tersebut dapat direalisasikan.

Hasil dari hipotesis ini menyatakan bahwa Aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi hitung (0.012) < taraf signifikan (0.05). hal ini mengindikasikan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini sejalan dan mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriany (2016), Timuriana dan Muhammad (2015). Dengan diberlakukannya PSAK no.46 yang mensyaratkan para manajer untuk mengakui dan menilai kembali aset pajak tangguhan yang dapat disebut pencadangan nilai aset pajak tangguhan. Peraturan ini dapat memberikan kebebasan pada para manajer untuk menentukan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian aset pajak tangguhan pada laporan keuangannya, sehingga dapat mengindikasikan adanya tindakan manajemen laba yang dilakukan perusahaan dalam laporan keuangan yang dilaporkan. Aset pajak tangguhan yang jumlahnya diperbesar oleh manajemen untuk meminimalisasi pembayaran pajak agar tidak merugikan perusahaan. Pajak yang seharusnya dibayarkan pada periode sekarang dialihkan pada periode mendatang. Dengan demikian laba perusahaan pun akan meningkat karna

beban pajak yang harus dibayarkan lebih kecil (Timuriana, 2015). Aset pajak tangguhan terbukti dapat digunakan sebagai indikator manajemen laba, Jika jumlah aset pajak tangguhan semakin banyak maka semakin tinggi indikasi perusahaan melakukan manajemen laba. Salah satu alasan yang mendasari manajemen melakukan manajemen laba dengan mengatur jumlah Aset pajak tangguhan yakni motivasi adanya pemberian bonus, beban politis atas besarnya perusahaan dan meminimalisir pembayaran pajak agar tidak merugikan perusahaan.

Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Kenaikan kewajiban pajak tangguhan konsisten dengan perusahaan yang mengakui pendapatan lebih awal atau menunda biaya untuk tujuan pelaporan keuangan komersial pada periode tersebut dibanding tujuan pelaporan pajak. Tindakan perusahaan mengakui pendapatan lebih awal dan menunda biaya mengindikasikan bahwa manajemen melakukan manajemen laba pada laporan keuangan komersial. Semakin tingginya praktik manajemen laba, maka semakin tinggi kewajiban pajak tangguhan yang diakui oleh perusahaan sebagai beban pajak tangguhan (Sumomba, 2012). Menurut Harnanto (2011:115) Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Beban pajak tangguhan memberikan informasi tentang pendapatan saat ini dan masa depan (misalnya, persistensi laba dan pertumbuhan masa depan) dan berpotensi mengindikasikan manajemen laba. Beban pajak tangguhan dapat digunakan dan memiliki kemampuan dalam mendeteksi manajemen laba yang dilakukan perusahaan dalam memenuhi dua tujuan, yaitu untuk menghindari penurunan laba dan untuk menghindari kerugian.

Hasil dari hipotesis ini menyatakan bahwa Beban pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi hitung $(0.023) < \text{taraf signifikansi } (0.05)$. Hal ini mengindikasikan bahwa Beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini sejalan dan mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Pindiharti (2011), Anasta (2015). Beban pajak tangguhan merupakan saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasi pada periode mendatang menurut PSAK No. 46 (IAI, 2009:8). Standar akuntansi lebih memberikan keleluasan terhadap manajemen untuk menentukan prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan menurut pajak. Hal ini membuat manajemen memanfaatkan celah untuk mengatur besarnya beban pajak tangguhan yang dimiliki. Menurut Zain (2008:187) pajak tangguhan terjadi akibat perbedaan antara PPh terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan (pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer. Besarnya pajak tangguhan bersih berpengaruh terhadap pembayaran pajak masa depan yang tercermin pada pajak masa kini ditahun mendatang. Hasil ini sejalan dengan pendapat Waluyo (2008:216), pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan.

Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan berbagai upaya, sepanjang kegiatan tersebut masih berada di dalam peraturan

perpajakan yang berlaku. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (Mahpudin, 2017). Menurut Suandy (2011) mendefinisikan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. Seminimal mungkin dalam hal ini dilakukan sepanjang hal ini masih berada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*) ini dilegalkan oleh pemerintah. Perencanaan pajak memiliki pengaruh, yakni semakin bagus perencanaan pajak maka semakin besar perusahaan melakukan manajemen laba. Salah satu perencanaan pajak adalah dengan cara mengatur seberapa besar laba yang dilaporkan, sehingga masuk dalam indikasi adanya praktik manajemen laba. Untuk menghindari hal tersebut maka perusahaan akan melakukan manajemen laba agar laba yang dilaporkan kepada fiskal lebih rendah sehingga akan mengurangi beban pajak yang akan ditanggungnya (Fitriany, 2016).

Hasil dari hipotesis ini menyatakan bahwa Perencanaan Pajak tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi hitung (0.0792) > taraf signifikan (0.05). Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, yang artinya hipotesis ini ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dan mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditama dan Purwaningsih (2014). Sulistyanto (2008:96) menyatakan bahwa semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar pula pajak yang ditanggung. Sebaliknya semakin kecil laba yang diperoleh perusahaan, semakin kecil pula kewajiban perpajakan yang ditanggung. Pernyataan ini sejalan dengan Aditama (2014) yang mengatakan bahwa tujuan perusahaan melakukan manajemen laba untuk menghindari penurunan laba, sedangkan tujuan perencanaan pajak adalah untuk memangkas besarnya laba kena pajak perusahaan. Dalam penelitian ini perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba disebabkan perusahaan kebanyakan melakukan manajemen laba untuk menaikkan laba agar laba yang dihasilkan semakin banyak, tentunya hal ini tidak sejalan dengan perencanaan pajak yang justru ingin menampilkan laba seminim mungkin agar perusahaan membayar pajak yang sedikit.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut: 1) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukkan dengan adanya aset pajak tangguhan pada perusahaan yang meningkat maka semakin besar pula tingkat manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan; 2) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba dengan arah koefisien negatif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Beban pajak tangguhan yang merupakan kewajiban pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan jumlahnya cukup tinggi, sehingga laba perusahaan akan menurun dikarenakan kewajiban pajak tersebut. Maka, manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan cukup rendah; 3) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini menyatakan bahwa perusahaan yang dijadikan sampel cenderung memanajemen labanya dengan meningkatkan laba yang diperoleh. Tentunya, hal ini tidak sejalan dengan variabel perencanaan pajak dikarenakan perusahaan harus membuat perolehan labanya seminim mungkin agar kewajiban pajak yang dibayarkan semakin sedikit.

Saran

Berikut beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini: 1) Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 14 sampel. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya perlu menambahkan jumlah perusahaan yang menjadi objek penelitian, sehingga diperoleh sampel yang lebih besar dan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh kondisi yang sebenarnya; 2) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek lain, tidak hanya pada perusahaan bidang *food & beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tetapi juga industri dari sektor lainnya misalnya manufaktur dan lain-lain atau berasal dari semua jenis perusahaan publik; 3) Penelitian selanjutnya diharapkan juga menggunakan variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam model regresi pada penelitian ini, seperti variabel tingkat hutang, ekuitas, akrual, dan karakteristik perusahaan sehingga lebih mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap manajemen laba; 4) Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan obyek sampel dari populasi perusahaan *food & beverage* selama periode 3 tahun yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Besar harapan untuk peneliti selanjutnya akan lebih baik jika memperluas obyek dengan mengambil sampel lebih banyak guna mendapatkan hasil yang lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, F., dan A. Purwaningsih. 2014. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Non manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *MODUS* 26(1): 33-50.
- Anasta, L. 2015. Analisa Pengaruh Deferred Tax Asset, Deferred Tax Liabilities Dan Tingkat Hutang Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Sub Sektor Industri Makanan Dan Minuman Di Indonesia. *Jurnal Tekun* 4(2): 250-270.
- Djamaludin, S. 2008. Analisis Pengaruh Laba Akuntansi Dan Laba Fiskal terhadap Persistensi Laba, Akrual dan Kas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 11(1): 55-67.
- Fahmi, I. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: alfabeta.
- Fitriany, L. C. 2016. Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2013). *JOM FEKON* 3(1).
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisa Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hakim, R.A., dan P. Sugeng. 2015. Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4(7).
- Harnanto. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Mahpudin, E. 2017. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Yang Termasuk Dalam Jakarta Islamic Index. *Universitas Singaperbangsa Karawang* 2(2).
- Ningsih, F.C. 2017. Pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, perencanaan pajak terhadap manajemen laba (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pindiharti, D. 2011. Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Akrual terhadap *Earning Management* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Suandy, E. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Subagyo, Oktavia, dan Mariana. 2011. Pengaruh Discretionary Accrual dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi* 11(1): 355-376.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyanto, H. Sri. 2008. *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*. Jakarta: Grasindo.
- Sumomba, C.R., dan YB. S. Hutomo. 2012. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba. *KINERJA* 16(2): 103-115.

- Timuriana, T., dan R.R. Muhamad. 2015. Pengaruh Aset Pajak Tangguhan Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*. 1(2): 12-20.
- Trisnawati., dan Agoes. 2013. *Akuntansi Perpajakan edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ulfah, Yana. 2013. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Praktik Manajemen Laba. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.
- Waluyo. 2008. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Watts, Ross L., dan Jerold L. Zimmerman (1986). *Positive Accounting Theory*. USA: Prentice-Hall.
- Zain, M. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Zulhamri, Lya. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan Profitabilitas dan Financial Leverage Terhadap Praktik Perataan Laba (Income Smoothing). *Jurnal Akuntansi*. Hal 37.